

# Konflik Perebutan Lahan Parkir di Sekanak yang Memicu Bentrok antara Dinas Perhubungan dengan Sejumlah Kelompok

RM. Syahrullah <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang <sup>1</sup>; [syahrullah0710@gmail.com](mailto:syahrullah0710@gmail.com)

**Abstrak:** Perebutan lahan parkir tentunya sudah tidak asing di dengar karena sudah sering sekali terjadi di Kota Palembang khususnya di daerah sekanak. Biasanya fenomena seperti ini terjadi karena benturan pandangan, egoisme yang tinggi, fanatik kelompok, tidak adanya sifat terbuka dan yang paling berpengaruh kurangnya komunikasi sesama juru parkir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konflik perebutan lahan parkir di sekanak yang memicu bentrok antara dinas perhubungan dengan sejumlah kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dari obyek penelitian. Hasil dari penelitian ini terdapat konflik antara juru parkir dengan dinas perhubungan dimana terdapat faktor perebutan lahan yang mendorong kerjasama antara juru parkir. Faktor penyebab lainnya seperti kebutuhan ekonomi, rendahnya pendidikan, cemburu sosial, kurangnya lahan parkir, dorongan merampas hak, dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengelolaan perparkiran.

**Kata Kunci:** Lahan Parkir, Dinas Perhubungan, Juru Parkir

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1878>

\*Correspondensi: RM. Syahrullah

Email: [syahrullah0710@gmail.com](mailto:syahrullah0710@gmail.com)

Received: 15-11-2023

Accepted: 17-12-2023

Published: 31-01-2024



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *Fighting over parking spaces is certainly a familiar thing to hear because it happens very often in the city of Palembang, especially in the Sekkan area. Usually, phenomena like this occur due to clashing views, high levels of egoism, group fanaticism, lack of openness and, most importantly, lack of communication between parking attendants. The aim of this research is to find out how conflicts over parking spaces in childhood trigger clashes between the transportation service and a number of groups. The research method used is descriptive qualitative research, namely research that aims to describe or examine systematically, factually and accurately the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated from the research object. The results of this research show that there is a conflict between parking attendants and the transportation service where there is a conflict over land which encourages cooperation between parking attendants. Other causal factors include economic needs, low education, social jealousy, lack of parking space, encouragement to usurp rights, and lack of attention from the government in parking management.*

**Keywords:** *Parking Land, Department of Transportation, Parking Attendant community service, education.*

## Pendahuluan

Soekanto (1990) mengemukakan secara sosiologis yuridis perkembangan wilayah perkotaan yang relatif pesat di Indonesia berpengaruh terhadap segi kehidupan sosial-ekonomi, kehidupan yang tentram dan tertib, perkembangan kota, transportasi dan lalu lintas. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan merupakan salah satu persoalan yang paling problematis dewasa ini (Park, 2019). Pemerintah di wilayah perkotaan, apalagi kota semacam Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang dan kota-kota besar lainnya harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang terus bertambah kompleks dan menumpuk sementara kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya relatif terbatas (Haller, 2019). Demikian halnya dengan terbatasnya daya serap maupun daya tampung kota.

Meningkatnya angka pengangguran, semakin maraknya kriminalitas, tidak memadainya sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya adalah beberapa potret kusam yang merefleksikan ketidakramahan kawasan perkotaan (Zhang, 2018). Kota juga menjadi area perebutan masyarakat ketika batasan-batasan etika, moral, dan hukum menjadi semakin kabur. Perkembangan Palembang dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, maupun informasi dan teknologi. Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini (Busscher, 2018). Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak. hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan tata kota yang semakin buruk karena tidak dimbangi dengan pengaturan yang baik (Bockstael, 2019). Semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan lainnya Hal ini menjadi kesempatan kehadirannya para juru parkir baik yang resmi maupun tidak resmi.

Kehadiran atau semakin banyaknya masyarakat ingin menjadi juru parkir maka banyak fenomena-fenomena sosial yang muncul salah satunya perebutan lahan parkir (Lanz, 2018). Fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dinikmati oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: 1997). Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu (Brito, 2019). Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Perebutan lahan parkir adalah saling menguasai diantara kelompok juru parkir.

*Emile Durkheim* mengatakan fakta sosial itu, misalnya hukum, adat kebiasaan, norma, bahasa dan sistemnya, sistem kepercayaan, dan tatanan kehidupan masyarakat lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan tersebut berwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu (Barbesgaard, 2019).

Di Kota Palembang permusuhan, perkelahian, bahkan saling serang antar kelompok juru parkir ketika kalah dalam memperebutkan lahan parkir sudah sering terjadi, seperti: pernah terjadi aksi penyerangan sebuah destinasi wisata terjadi di jalan sekanak lambidaro Kota Palembang Sumatera Selatan yang dimana Menurut Angga, salah satu pelaku, penyerangan ini dilakukan akibat masalah perebutan lahan parkir dengan tukang parkir yang beroperasi di depan destinasi wisata tersebut (McSweeney, 2018). Melihat di berbagai

tempat di kota ini, terdapat banyak tempat-tempat parkir yang didapat melalui perkelahian, atau biasa juga sering kita lihat siapa yang berkuasa di wilayah tersebut maka dia yang berhak untuk menguasai lahan parkir yang ada, biasa disebut jagoan (preman), yang marginalisasi kelompok minoritas oleh mayoritas (Dunlap, 2020b). Perebutan lahan parkir tentunya sudah tidak asing di dengar karena sudah sering sekali terjadi di Kota Palembang khususnya di daerah sekanak. Biasanya fenomena seperti ini terjadi karena benturan pandangan, egoisme yang tinggi, fanatik kelompok, tidak adanya sifat terbuka dan yang paling berpengaruh kurangnya saluran komunikasi diantara masyarakat sehingga tidak bisa melakukan kerjasama dalam berprofesi sebagai juru parkir (Dunlap, 2020a).

Perebutan lahan parkir di daerah sekanak ini sangat menarik dimana ketika mendengar kata perebutan berarti identik saling kontak fisik atau perkelahian. Perebutan lahan parkir ini memicu bentrok antara dinas perhubungan dengan sejumlah kelompok yang membuat kejadian ini banyak korban yang mengalami luka-luka dan saat itu juga di amankan oleh pihak kepolisian (Schoenberger, 2018). Berprofesi sebagai juru parkir begitu banyak tantangan yang harus dihadapi yaitu bagaimana bersikap menjadi pelayan yang baik seperti merapikan, menjaga kendaraan yang sudah di parkir oleh pemiliknya. Belum lagi masih banyak orang yang memiliki kekuatan (preman) ingin mengganggu baik datang untuk meminta rokok, uang bahkan ingin merampas lahan yang sudah susah payah di dapat melalui perjuangan atau usaha yang tinggi (Hausermann, 2018).

Profesi juru parkir sebenarnya membantu pengendara dalam memarkir kendaraannya sehingga saat jumlah kendaraan terus bertambah, pengelolaan parkir di kota Makassar perlu di tata dengan aturan tegas (Gonda, 2019). Profesi ini mendapatkan lahan melalui perjuangan atau usaha sendiri seperti perselisihan, perkelahian yang biasanya di menangkan oleh preman atau kelompok yang mempunyai kekuatan. Adapun ciri-ciri petugas parkir resmi adalah dibekali dengan rompi parkir dan tanda pengenalan. Petugas parkir tidak resmi bisa menyalahgunakan nama pemerintah. Selain masalah parkir tidak resmi, warga sering resah oleh premanisme petugas parkir (Regassa, 2019). Melihat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana konflik perebutan lahan parkir di sekanak yang memicu bentrok antara dinas perhubungan dengan sejumlah kelompok.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dari obyek penelitian (Emzir, 2011; Farma, 2011; Moleong, 2012).

## Pembahasan

### A. Fenomena Sosial

Fenomena yang biasa kita ketahui adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena sosial dapat di artikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang

terjadi dan dapat di amati dalam kehidupan sosialnya. Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat (*Fenomena*, 1894; Ingalls, 2018). Fenomena di artikan sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat di amati dan di nilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: 1997). Fenomena juga bisa disebut hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia, Suatu peristiwa yang tidak biasa tapi sering terjadi, pada alam atau makhluk (Waluyo, 2011:18) (Fahrudin, 2012)

## B. Juru Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Juru (tukang) parkir adalah orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan keterampilan dalam mengatur mobil yang diparkir (<http://kbbi.web.id/parkir>). Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar keadaan dan kebutuhannya (Wicaksono,1989).

Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada tempat khusus parkir. (Kompasiana,10 maret 2011) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Dirjen Perhubungan Darat, 1996). Penataan parkir merupakan unsur yang penting dalam elemen perancangan perkotaan, dan termasuk dalam unsur sirkulasi dan parkir (*circulation and parking*).

Ruang parkir (*parkir space*) adalah area yang cukup luas untuk menampung satu kendaraan dengan akses yang tidak terbatas (tidak ada blokade) tetapi tetap mencegah adanya ruang untuk manuever kendaraan (Edward,1992), Akumulasi parkir (parkir *accumulation* adalah total jumlah kendaraan yang diparkir di dalam areal tertentu pada waktu tertentu (Edward,1992), Durasi parkir (*parking duration*) adalah lama waktu parkir satu ruang parkir.

## C. Hakikat Masyarakat

Masyarakat sering dikenal dengan istilah *society* yang membentuk berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi dalam kelompok tersebut. Menurut *Wikipedia*, kata masyarakat sendiri diambil dari bahasa Arab, *musyarak* (Fahdisjro, 2014). Masyarakat juga biasa diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar, biasanya masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat di dalamnya (Kansanga, 2018).

Menurut *Comte* (Dalam Ambo Upe 2010 : 75) mengatakan masyarakat adalah suatu kenyataan sosial yang lebih dari sekedar bagian-bagian yang saling tergantung.

*Robert K. Merton* (dalam Ritzer 2011 : 21) mengatakan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Menurut Gillin dan Gillin (dalam saebani 2012 : 137) mengatakan masyarakat adalah kelompok hidup manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

#### D. Pengertian Kawasan Parkir

Kawasan Parkir adalah Kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk (Burhanudin, 2013). Satuan Ruang Parkir (SRP) merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan satu buah kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor). Di dalamnya sudah termasuk ruang bebas di kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak untuk kursi roda khusus untuk parkir kendaraan bagi penderita cacat serta ruang bebas depan dan belakang (Kenney-Lazar, 2018). Bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Dalam kawasan parkir ada yang dinamakan parkir tetap dan parkir sementara. Permintaan parkir didistribusikan pada tata guna lahan suatu area.

Penetapan pilihan tempat parkir kendaraan yang dibuat dan cara parkir dikelompokkan sebagai berikut:

Menurut Penempatannya:

1. Parkir di Badan Jalan (*On street Parking*)

Tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan. Parkir di jalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, tingkah pengendara sepeda motor yang tak menentu dan pejalan kaki yang muncul diantara kendaraan parkir (Franco, 2019). Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan karena banyak tempat (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak mempunyai tempat parkir yang memadai.

2. Parkir di luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Di kebanyakan kawasan pusat kota, parkir di pinggir jalan sangat dibatasi sehingga diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan. Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan yaitu: a) pelataran parkir di permukaan tanah, b) garasi bertingkat, c) garasi bawah tanah, d) gabungan, e) garasi mekanis dan f) *drive in*. (F.D. Hobbs, 1995) Pedoman perancangan untuk parkir *off street* di dasarkan pada ukuran kendaraan rencana, luas lahan parkir, kapasitas parkir, serta tata letak kendaraan untuk memudahkan kendaraan masuk dan keluar parkir.

#### E. Pengertian Konflik

Mcshane dan von glinow (dalam Wibowo:219) mengatakan konflik sebagai suatu proses dimana satu pihak merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Wes Sharrock, (Jones, 2010) mengatakan konflik dibangun atas dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas dan ditekan. Coser, (dalam Poloma.2013:106). Coser mengatakan konflik

memberikan sumbangan yang secara potensial positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari pada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan (Tura, 2018). Konflik perebutan lahan parkir sering sekali terjadi terjadi karena perputaran uang pada lahan parkir tersebut dapat mencapai hingga jutaan rupiah sehingga banyak masyarakat yang tertarik menjadi juru parkir.

Konflik ini kerap melibatkan para preman-preman bahkan sampai berjatuh korban jiwa. Konflik meluap dikarenakan perebutan daerah kekuasaan yang membesar sampai konflik antar RAS, organisasi hingga kelompok-kelompok masyarakat sekitar. Robbins dan judge (dalam Wibowo : 163) kelompok adalah kumpulan dua atau lebih individu, berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama untuk mencapai sasaran tertentu . Konflik sosial juga terjadi dalam hal ini perebutan lahan parkir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kemiskinan, SDM yang rendah, desakan kebutuhan ekonomi, fanatisme diantar kelompok dll serta kebijakan pemerintah mengenai kehidupan sosial (Wardi, 2006).

## Hasil

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Konflik juru parkir di sekanak kota Palembang antara lain : Benturan (gesekan) antara juru parkir dengan dinas perhubungan, hadirnya juru parkir tidak resmi, adanya pengunjung yang tidak membayar uang parkir, adanya gangguan seperti minta uang, rokok dan perebutan lahan parkir. Namun fenomena yang menarik yaitu perebutan lahan parkir. Adanya fenomena tersebut mendorong terjadinya kerjasama di antar juru parkir karena ketika ada masalah mereka bermusyawarah dengan baik dan mengedepankan kesadaran untuk saling menghargai, sehingga tercipta keamanan dalam beroperasi sebagai profesi juru parkir.
2. Dari temuan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perebutan lahan parkir di sekanak kota Palembang adalah antara lain Faktor kebutuhan atau desakan ekonomi, faktor Rendahnya pendidikan sehingga berlomba-lomba untuk memilih menjadi juru parkir karena tidak memakai ijazah, faktor kecemburuan sosial dimana cemburu terhadap pendapatan dari juru parkir yang kalau dilihat secara sepintas pekerjaannya tidak terlalu berat, faktor kurangnya lahan parkir yang tersedia, faktor merasa memiliki kekuatan sehingga ingin merampas hak orang lain dan juga faktor kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang mengelola perparkiran di Kota Palembang (Faried & Alam, 2012).

## Daftar Pustaka

- Barbesgaard, M. (2019). Ocean and land control-grabbing: The political economy of landscape transformation in Northern Tanintharyi, Myanmar. *Journal of Rural Studies*, 69, 195–203. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.014>
- Bockstael, S. Van. (2019). Land grabbing “from below”? Illicit artisanal gold mining and access to land in post-conflict Côte d’Ivoire. *Land Use Policy*, 81, 904–914. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.045>
- Brito, B. (2019). Stimulus for land grabbing and deforestation in the Brazilian Amazon. *Environmental Research Letters*, 14(6). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab1e24>
- Burhanudin, H. (2013). *Pengumpulan Data - Data Instrument Penelitian*. <https://afidburhanuddin.wordpress.com/>
- Busscher, N. (2018). Land grabbing within a protected area: The experience of local communities with conservation and forestry activities in Los Esteros del Iberá Argentina. *Land Use Policy*, 78, 572–582. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.024>
- Dunlap, A. (2020a). Bureaucratic land grabbing for infrastructural colonization: renewable energy, L’Amassada, and resistance in southern France. *Human Geography(United Kingdom)*, 13(2), 109–126. <https://doi.org/10.1177/1942778620918041>
- Dunlap, A. (2020b). Wind, coal, and copper: the politics of land grabbing, counterinsurgency, and the social engineering of extraction. *Globalizations*, 17(4), 661–682. <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1682789>
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fahdisjro. (2014). *Permasalahan Sosial*. <http://www.fahdisjro.com/>
- Fahrudin, A. (2012). *Kesejahteraan Sosial Internasional*. Alfabeta.
- Faried, A., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.
- Farma, S. (2011). *Metode dan Teknik Pengumpulan Data*. <http://salimafarma.blogspot.com/>
- Fenomena. (1894). <http://www.kamusbesar.com/>
- Franco, J. C. (2019). Grey areas in green grabbing: subtle and indirect interconnections between climate change politics and land grabs and their implications for research. *Land Use Policy*, 84, 192–199. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.013>
- Gonda, N. (2019). Land grabbing and the making of an authoritarian populist regime in Hungary. *Journal of Peasant Studies*, 46(3), 606–625. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1584190>
- Haller, T. (2019). The different meanings of land in the age of neoliberalism: Theoretical reflections on commons and resilience grabbing from a social anthropological perspective. *Land*, 8(7). <https://doi.org/10.3390/land8070104>
- Hausermann, H. (2018). Land-grabbing, land-use transformation and social differentiation: Deconstructing “small-scale” in Ghana’s recent gold rush. *World Development*, 108, 103–114. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.03.014>

- Ingalls, M. L. (2018). The transboundary displacement of deforestation under REDD+: Problematic intersections between the trade of forest-risk commodities and land grabbing in the Mekong region. *Global Environmental Change*, 50, 255–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.04.003>
- Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-teori Sosial dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Obor.
- Kansanga, M. (2018). Contested commons: Agricultural modernization, tenure ambiguities and intra-familial land grabbing in Ghana. *Land Use Policy*, 75, 215–224. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.047>
- Kenney-Lazar, M. (2018). Governing Dispossession: Relational Land Grabbing in Laos. *Annals of the American Association of Geographers*, 108(3), 679–694. <https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1373627>
- Lanz, K. (2018). Land Grabbing, the State and Chiefs: The Politics of Extending Commercial Agriculture in Ghana. *Development and Change*, 49(6), 1526–1552. <https://doi.org/10.1111/dech.12429>
- McSweeney, K. (2018). Grounding traffic: The cocaine commodity chain and land grabbing in eastern Honduras. *Geoforum*, 95, 122–132. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.07.008>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda.
- Park, C. M. Y. (2019). “Our Lands are Our Lives”: Gendered Experiences of Resistance to Land Grabbing in Rural Cambodia. *Feminist Economics*, 25(4), 21–44. <https://doi.org/10.1080/13545701.2018.1503417>
- Regassa, A. (2019). ‘Civilizing’ the pastoral frontier: land grabbing, dispossession and coercive agrarian development in Ethiopia. *Journal of Peasant Studies*, 46(5), 935–955. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1420060>
- Schoenberger, L. (2018). “They Turn Us into Criminals”: Embodiments of Fear in Cambodian Land Grabbing. *Annals of the American Association of Geographers*, 108(5), 1338–1353. <https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1420462>
- Tura, H. A. (2018). Land rights and land grabbing in Oromia, Ethiopia. *Land Use Policy*, 70, 247–255. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.024>
- Wardi, B. (2006). *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Zhang, Y. (2018). Grabbing Land for Equitable Development? Reengineering Land Dispossession through Securitising Land Development Rights in Chongqing. *Antipode*, 50(4), 1120–1140. <https://doi.org/10.1111/anti.12390>